



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOGA HARDAYA
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 36279

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.944.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m²/9.5 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 14.5 m²/32.75 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.425.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 12.1 m²/20 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 484.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.193.000.000

1. MOBIL, NISSAN JUKE 1.5 (4 X 2) A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2. 4 6 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. MOTOR, HONDA NC11C1C A/T / SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. MOBIL, ALPHARD MPV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000



8. MOBIL, HONDA HRV CITY CAR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	41.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	205.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.383.250.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.383.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.